

POLEMIK KEBIJAKAN IMPOR BERAS TAHUN 2021

19

T. Ade Surya

Abstrak

Pemerintah memutuskan melakukan impor beras untuk menjaga ketersediaan stok, kelancaran pasokan, dan kestabilan harga beras. Pemerintah beralasan, kebijakan ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan beras sepanjang tahun 2021 di tengah kekhawatiran terjadinya krisis pangan akibat situasi pandemi. Namun kebijakan ini menuai polemik dalam masyarakat dan ditentang oleh banyak kalangan, terutama para petani. Tulisan ini membahas polemik tentang keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras dan dampaknya bagi para petani dan sektor pertanian. Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang kebijakan impor beras dan dapat mengutamakan penyerapan beras produksi dalam negeri. Komisi IV DPR RI secara tegas telah menolak kebijakan impor beras. Namun selanjutnya diperlukan pengawasan terhadap program dan kebijakan pemerintah, untuk mengelola komoditas pangan nasional dengan mengutamakan dan mengoptimalkan produksi beras dalam negeri dan memerhatikan kesejahteraan petani.

Pendahuluan

Pemerintah berencana melakukan impor beras sebanyak satu juta ton untuk menjaga kelancaran pasokan dan kestabilan harga beras di pasaran. Kebijakan impor beras ini dipandang perlu oleh pemerintah utamanya untuk menjamin ketersediaan beras di tengah masa pandemi yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya krisis pangan. Sebagaimana peringatan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO), bahwa potensi terjadinya krisis pangan akibat situasi pandemi cukup besar yang di antaranya disebabkan

oleh terbatasnya tenaga kerja di sektor pertanian dan terganggunya rantai pasok pangan (bbc.com, 16 Maret 2021). Selain sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya krisis pangan, kebijakan impor beras juga dilakukan untuk menjamin ketersediaan stok beras nasional sepanjang tahun 2021, agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik, sekaligus dapat mendorong kinerja perekonomian nasional (Kompas, 13 Maret 2021).

Pemerintah akan mengimpor beras dari Thailand melalui kesepakatan kerja sama yang dituangkan dalam



Memorandum of Understanding (MoU). MoU ini akan mengkomodasi penjualan beras dari Thailand ke Indonesia sebanyak satu juta ton dalam setahun untuk jangka waktu empat tahun. Namun kesepakatan ini juga akan mempertimbangkan faktor tingkat produksi di kedua negara dan harga beras dunia sehingga belum tentu juga impor beras akan terlaksana (Bisnis Indonesia, 16 Maret 2021). Dalam upaya merealisasikan impor beras, pemerintah telah memberikan penugasan kepada Perum Bulog dengan rincian 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton untuk beras komersial Perum Bulog yang bisa diperdagangkan secara bebas (Republika, 17 Maret 2021). Tulisan ini membahas polemik tentang keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras, serta dampak dari kebijakan impor bagi petani dan sektor pertanian.

Polemik Impor Beras: Pro dan Kontra

Keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras di tahun 2021 mengundang polemik di masyarakat. Banyak kalangan terutama petani yang menentang kebijakan impor beras ini, terlebih momentumnya sangat tidak tepat. Pemerintah mewacanakan dan memutuskan untuk melakukan impor beras di saat para petani sedang menikmati panen raya, walaupun realisasinya baru akan dilakukan setelah masa panen raya selesai. Sementara itu, produksi beras nasional pada tahun ini diperkirakan akan meningkat dari tahun sebelumnya di mana pada tahun lalu tidak dilakukan impor sehingga kebijakan melakukan impor beras menjadi pertanyaan besar.

Namun pemerintah mengemukakan, kebijakan impor beras memang sangat diperlukan, dengan berbagai alasan yang mendasarinya. **Pertama**, seperti telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan impor beras ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok beras dalam negeri, sebagai upaya menjaga kelancaran pasokan dan kestabilan harga, serta mengantisipasi potensi terjadinya krisis pangan sebagai akibat situasi pandemi.

Kedua, produksi beras di tiap provinsi tidak merata sehingga memunculkan daerah yang surplus dan defisit beras. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, menyatakan bahwa surplus produksi beras hanya berada di 6-7 provinsi yang memang merupakan sentra produksi sehingga masih banyak provinsi yang defisit beras, belum lagi wilayah di pulau-pulau. Dengan ketersediaan stok beras yang cukup maka Perum Bulog dapat menyalurkan beras ke provinsi atau wilayah-wilayah yang defisit tersebut (Kompas, 13 Maret 2021).

Ketiga, pengaruh cuaca terhadap hasil produksi. Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mengemukakan bahwa tren produksi beras dalam dua tahun terakhir memang terus meningkat dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperkirakan produksi beras tahun ini akan meningkat. Namun mengingat tingkat curah hujan yang tinggi di beberapa daerah belakangan ini, produksi beras pada tahun ini belum dapat dipastikan apakah meningkat atau menurun. Oleh karena itu, pemerintah perlu menambah ketersediaan cadangan beras untuk

memastikan kelancaran pasokan yang pemenuhannya dilakukan melalui impor. Pemerintah juga menjamin bahwa beras impor tersebut nantinya hanya akan disalurkan untuk kebutuhan mendesak seperti bantuan sosial dan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga (money.kompas.com, 17 Maret 2021).

Di sisi lain, kalangan yang tidak setuju dengan kebijakan impor beras juga mempunyai alasan yang kuat. **Pertama**, BPS memproyeksikan produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang bulan Januari-April 2021 meningkat 26,88% dibanding periode yang sama pada tahun 2020 lalu, menjadi 25,37 juta ton atau setara 14,54 juta ton beras (Kompas, 17 Maret 2021). Data BPS juga menunjukkan bahwa produksi beras nasional dapat memenuhi kebutuhan sekitar 29 juta ton per tahun. Produksi beras nasional pada tahun 2019 mencapai 31,31 juta ton dan meningkat menjadi 31,33 juta ton pada tahun 2020 (Kompas, 13 Maret 2021). Data-data dari BPS ini seharusnya menjadi acuan utama sebelum pemerintah memutuskan untuk melakukan kebijakan impor beras. **Kedua**, masa panen raya yang akan berlangsung sepanjang bulan Januari-April berpotensi membuat surplus 4,8 juta ton beras. Hal ini tentunya akan membuat harga gabah dan beras di pasaran menjadi turun. **Ketiga**, stok beras Perum Bulog per 14 Maret 2021 masih cukup banyak yaitu mencapai 883.585 ton. Sebanyak 859.877 ton di antaranya merupakan CBP dan sisanya adalah beras komersial Perum Bulog (Kompas, 17 Maret 2021).

Sementara terkait kesenjangan produksi beras antarprovinsi di mana ada provinsi yang surplus dan defisit beras, tidak bisa dijadikan alasan

kuat untuk mengimpor beras, karena solusi yang dikedepankan seharusnya adalah dengan melakukan penguatan koordinasi antardaerah. Seperti yang diutarakan Bhima Yudhistira, ekonom *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*, impor beras bukanlah solusi untuk mengatasi persoalan kesenjangan stok beras antardaerah. Pada masa panen raya, seharusnya distribusi diperkuat sehingga stok daerah yang surplus dapat disalurkan ke daerah yang defisit (Kompas, 13 Maret 2021).

Perum Bulog sendiri sebenarnya tidak terlalu setuju jika langkah pemerintah untuk memenuhi ketersediaan stok beras langsung berfokus pada impor. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyatakan bahwa Perum Bulog memprioritaskan penyerapan beras produksi dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan penugasan dari pemerintah untuk mengimpor satu juta ton beras pada tahun ini. Target penyerapannya dalam tiga bulan ke depan mencapai 500 ribu ton. Saat ini di masa panen raya, Perum Bulog bersama Kementerian Pertanian masih terus melakukan penyerapan gabah dan beras di seluruh Indonesia (Republika, 16 Maret 2021).

Terkait kebijakan impor beras yang menimbulkan polemik dalam masyarakat, penulis berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah tidak perlu melakukan impor beras, terlebih kebijakan tersebut diputuskan di awal tahun dan di masa panen raya. Pemerintah seharusnya berupaya untuk meningkatkan penyerapan gabah petani di masa panen raya ini. Pemerintah sendiri sudah mengutarakan bahwa produksi beras pada tahun ini belum dapat diketahui apakah meningkat atau menurun

sehingga dengan dasar itu, keputusan untuk melakukan impor beras tidak perlu dilakukan terburu-buru. Pemerintah sebaiknya menetapkan kriteria yang ketat sebelum dapat memutuskan untuk mengimpor beras seperti bagaimana hasil panen raya, bagaimana kondisi cadangan beras nasional, apakah terjadi bencana alam yang memengaruhi sektor pertanian, apakah terjadi hama penyakit yang memengaruhi produksi beras nasional, dan lain sebagainya. Di samping itu, pada tahun 2020 lalu pemerintah juga telah memulai program perluasan areal tanam baru pertanian dan membuat lumbung pangan (*food estate*) untuk meningkatkan produksi beras nasional. Seharusnya pemerintah fokus pada program-program tersebut terlebih dahulu.

Dampak Kebijakan Impor Beras

Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah sebenarnya sangat bisa dipahami. Pemerintah berupaya memperkuat ketahanan stok beras nasional sekaligus mengantisipasi kurangnya pasokan dan lonjakan harga beras akibat “permainan” spekulasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mendapatkan keistimewaan melalui MoU ekspor impor beras agar menjadi prioritas oleh negara pengimpor seandainya memerlukan tambahan stok beras melalui pengadaan luar negeri. Namun kebijakan impor beras memiliki dampak yang kurang baik bagi sektor pertanian dalam negeri, khususnya bagi para petani. Ketika Pemerintah mulai mewacanakan kebijakan ini, harga gabah di pasaran langsung tertekan dan sangat merugikan petani, walaupun pada akhirnya belum tentu juga kebijakan ini direalisasikan.

Bagi para petani, keputusan untuk melakukan kebijakan impor beras di masa panen raya benar-benar memukul mereka karena langsung berdampak pada semakin merosotnya harga gabah kering panen (GKP) di pasaran, karena di masa panen, harga GKP biasanya akan menurun karena melimpahnya suplai. Padahal, sektor pertanian adalah salah satu sektor yang tumbuh positif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi tahun 2020 lalu. Jika petani terus merasa dirugikan atau tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah maka profesi petani akan semakin ditinggalkan. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Kebijakan impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah kemudian menimbulkan pertanyaan, khususnya terkait dengan upaya pemerintah selama ini untuk mewujudkan swasembada pangan. Di balik berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan swasembada pangan, seharusnya upaya yang dilakukan sudah membuahkan hasil. Pada tahap awal, ukuran keberhasilan tersebut tidak perlu dinilai dari kemampuan untuk mengekspor beras, tetapi dapat diukur melalui berkurangnya tingkat kesenjangan produksi beras antardaerah, kecukupan stok beras di daerah-daerah, dan cadangan stok beras nasional. Dengan kebijakan impor beras maka menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk dapat mewujudkan swasembada pangan belum ada hasilnya dan masih jauh dari harapan.

Pemerintah juga dinilai cenderung mengambil kebijakan yang pragmatis untuk mengatasi masalah ketahanan beras nasional

dengan langsung memutuskan untuk mengimpor beras. Padahal, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat mengembangkan sektor pertanian menuju swasembada pangan. Pemerintah seharusnya memfokuskan pada kebijakan yang dapat menstimulasi produksi beras nasional seperti perluasan areal lahan, lumbung pangan, pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas penyerapan, insentif bagi para petani, subsidi pupuk, dan lainnya.

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian serta Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran, Komisi IV DPR RI telah menegaskan menolak kebijakan impor beras. Kebijakan ini dinilai kurang tepat karena produksi beras sampai dengan bulan Mei diperkirakan surplus dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah diharapkan dapat mengutamakan penyerapan hasil panen petani dengan harga yang baik sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat (dpr.go.id, 23 Maret 2021).

Penutup

Kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras sebaiknya dikaji ulang. Salah satunya adalah *timing* yang tidak tepat, yaitu diputuskan pada awal tahun. Padahal, pada masa tersebut belum dapat diketahui apakah produksi beras nasional dapat memenuhi kebutuhan stok beras atau tidak. Sebaiknya pemerintah menunggu sampai dengan pertengahan tahun sebelum memutuskan akan melakukan impor atau tidak, dengan berdasarkan indikator-indikator yang mulai tampak.

Kebijakan impor beras juga sangat merugikan petani, terlebih ketika pemerintah mewacanakan dan memutuskannya di masa panen

raya, karena menyebabkan anjloknya harga gabah. Pemerintah seharusnya memiliki kriteria yang ketat sebelum memutuskan untuk melakukan kebijakan impor beras. Selain itu, pemerintah sebaiknya berfokus pada penyerapan beras dalam negeri semaksimal mungkin dibandingkan dengan harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan stok beras nasional. Jika penyerapan beras dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan stok beras nasional, barulah pemerintah melakukan impor beras. Perum Bulog selaku lembaga logistik pangan juga dapat memperbaiki sistem manajemen stok agar sistem informasi perdagangan antarpulau dapat terintegrasi sehingga pendistribusian dapat berjalan dgn baik dan tepat sasaran.

Kebijakan untuk memenuhi ketersediaan beras serta menjaga kelancaran pasokan dan kestabilan harga beras sepatutnya kita dukung. Namun kebijakan impor seharusnya menjadi pilihan terakhir. DPR RI melalui Komisi IV sudah dengan tegas menolak kebijakan impor beras, karena belum ada dasar yang kuat untuk melakukan kebijakan tersebut. DPR RI perlu mengawasi program dan kebijakan pemerintah agar tata kelola komoditas pangan nasional dapat mengutamakan produksi dalam negeri dan memerhatikan kesejahteraan petani.

Referensi

- “Impor Bukan Solusi Defisit”, *Kompas*, 13 Maret 2021, hal. 9.
- Ishak S., Marenda. 2021. “Impor Beras dan Petani yang Terkurus”, *Kompas*, 13 Maret 2021, hal. 6.
- “Komisi IV Tolak Keras Impor 1 Juta Ton Beras”, 18 Maret 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/>

detail/id/32170/t/Komisi+IV+Tolak+Keras+Impor+1+Juta+Ton+Beras, diakses 23 Maret 2021.

“Mendag Sebut Impor Beras Tidak Akan Hancurkan Harga Gabah Petani”, 15 Maret 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/03/15/180447326/mendag-sebut-impor-beras-tidak-akan-hancurkan-harga-gabah-petani?>, diakses 17 Maret 2021.

Nasution, Dedy Darmawan dan Iit Septyaningsih. 2021. “Bulog Utamakan Beras Lokal”, *Republika*, 16 Maret 2021, hal. 9.

Nasution, Dedy Darmawan. 2021. “Kementan Optimistis Pasokan Beras Aman”, *Republika*, 17 Maret 2021, hal. 10.

“Pemerintah Canangkan Impor Beras di Tengah Panen Raya, Petani: 'Itu Menyakitkan'”, 10 Maret 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56336972>, diakses 16 Maret 2021.

“Prioritas Serap Beras Lokal”, *Kompas*, 17 Maret 2021, hal. 9.

Timorria, Iim F. 2021. “Dilema Impor Beras di Negara Agraris”, *Bisnis Indonesia*, 16 Maret 2021, hal. 18.



T. Ade Surya
teuku.surya@dpr.go.id

T. Ade Surya, S.T., M.M., menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia pada tahun 2006 dan pendidikan S2 Magister Manajemen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: "Domestic Market Obligation Batu Bara dalam Konteks Kebijakan Energi Nasional" (2018), "Kebijakan Pembangunan Infrastruktur: Optimalisasi Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Menuju Pertumbuhan Berkualitas" (2019), dan "Pengembangan Pelabuhan Berbasis Logistik: Permasalahan dan Perspektif Peningkatan Daya Saing" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.